

Faktor Geografi Dalam Mencegah Disintegrasi Bangsa (Upaya Mempertahankan Nasionalisme Indonesia)

M. Kadarisman

Abstrak

Setiap bangsa dalam rangka mempertahankan kehidupan dan eksistensinya, serta untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya, yaitu geostrategi nasional, perlu memiliki pemahaman ilmu geopolitik yang dalam implementasinya diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional. *Mapping global strategy* ke depan sangat diperlukan bagi setiap bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara yang merupakan konsep nasional dari ilmu geopolitik mengenai persatuan dan kesatuan dalam berbagai bidang kehidupan, menjadi perekat bangsa Indonesia.

Di lain pihak kini semakin sulit jiwa nasionalis kita temukan. Kita malah menganggap remeh para pejuang yang telah berjasa bagi kita. Pemerintah terkesan kurang memperhatikan nasib para veteran. Globalisasi dan kapitalisme telah mengubah mentalitas kita menjadi sangat jauh dari mental nasionalisme Indonesia. Banyak di antara kita yang rela menjual tanah airnya, hanya karena sedikit kemewahan dari negeri orang.

Kata kunci: Faktor geografi, disintegrasi, dan nasionalisme.

Pendahuluan

Bagi Indonesia, dengan wilayah, alam, sejarah dan penduduknya yang sangat beragam dan tersebar, terpeliharanya persatuan dan kesatuan nasional atau integrasi nasional merupakan masalah “hidup atau mati” –nya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan hanya ratusan suku bangsa yang perlu ditingkatkan rasa solidaritas, kebersamaan, kekeluargaan dan identitasnya, tetapi juga ribuan pulau besar kecil yang menjadikan negara ini negara kepulauan yang terbesar di dunia, harus disatukan secara politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan.

Integrasi bangsa yang dibangun dan sejarah masa lalu ternyata amat rapuh dalam menghadapi perubahan zaman. Di berbagai belahan bumi telah menjadi disintegrasi bangsa yang pada gilirannya juga menimbulkan keraguan di dalam diri kita “apakah nasionalisme

Indonesia masih mampu bertahan”. Pernyataan ini meskipun memberikan nuansa pesimistik, namun patut direnungkan secara mendalam agar integrasi dan nasionalisme tetap dapat berperan sebagai unsur paling penting dalam mengarahkan dinamika kehidupan nasional, dan tetap berada pada arah dan tujuannya.

Pertimbangan kondisi geografis ini merupakan salah satu pertimbangan penting dalam mengembangkan wawasan nasional sebagai wujud interelasi antarlingkungan kebangsaan dalam ruang hidup yang kemudian lebih dikenal sebagai Wawasan Nusantara, sebagai cara pandang bangsa Indonesia. Di sisi lain, merupakan suatu keniscayaan bahwa pembangunan nasional, penggerak bagi terwujudnya kesetaraan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa maju di dunia, membutuhkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pembangunan nasional yang sejalan dengan agenda utama reformasi yang sedang dijalankan bangsa Indonesia merupakan upaya mewujudkan keinginan bersama untuk membangun Indonesia Baru yang lebih mampu menjawab berbagai ancaman dan tantangan yang mempertaruhkan tetap tegaknya kedaulatan dan keutuhan wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini lebih dirasakan setelah perubahan keempat UUD 1945, permasalahan yang menonjol adalah adanya konflik politik sementara adendum perundangan-undangan sangat kompleks. Penegakkan hukum dan aparat penegak hukum akan mengalami perubahan-perubahan mendasar.

Berdasarkan fenomena di atas, maka permasalahan yang dihadapi adalah memanfaatkan sebesar-besarnya faktor-faktor geografi dalam mencegah disintegrasi bangsa serta mempertahankan nasionalisme Indonesia. Terkait dengan nasionalisme Indonesia tersebut adalah memudarkannya rasa kebangsaan bagi bangsa selama beberapa tahun belakangan ini.

Pembahasan

Letak geografis wilayah Indonesia merupakan suatu kesatuan yang menurut wujud ke dalam terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau di dalamnya, yang dalam bahasa asing disebut *archipelago*. Ke luar, kepulauan itu merupakan suatu *archipelago* yang terletak di antara benua Asia di sebelah utara dan benua Australia dan Pasifik di sebelah timur. Karena secara geografis berada di antara dua benua dan dua samudera yang penting itu, dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki suatu kedudukan geografi di tengah jalan lintas silang dunia.

Karena kedudukan yang strategi itu, dipandang dari tiga segi kesejahteraan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, Indonesia telah banyak mengalami pertemuan dengan

pengaruh pihak asing (*aculturation*). Menurut catatan, Indonesia terdiri dari wilayah lautan dengan 17.508 pulau besar dan kecil, diperkirakan hanya 3.000 pulau di antaranya yang didiami penduduk. Luas pulau-pulau diperkirakan 735.000 mil persegi, sekitar 4.760 pulau belum bernama, sedangkan luas perairannya di taksir dua sampai tiga kali luas tanah (pulau-pulau). Jarak antara ujung barat sampai ujung timur kira-kira 1.100 mil.

Secara geografis kepulauan Indonesia dapat dibagi dalam empat kelompok pulau, sebagai berikut:

1. Sunda Besar, terdiri dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.
2. Sunda kecil, dikenal sebagai Nusa Tenggara, yang terdiri dari Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, dan Flores.
3. Maluku, terdiri dari pulau-pulau di antara Sulawesi dan Irian Jaya (Papua), yaitu Halmahera, Buru, Seram, dan Amboina.
4. Papua dan pulau-pulau di sekitarnya, termasuk Maluku Utara.

Di pulau Kalimantan, daerah Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, sedangkan di pulau Irian (Papua) berbatasan dengan negara Papua Nugini. Pulau-pulau yang termasuk kategori besar adalah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, dan Jawa. Letak geografis negara kepulauan seperti Indonesia ini mengandung kerawanan hakiki karena dihadapkan pada kenyataan kuatnya pengaruh-pengaruh eksternal maupun internal.

Pengaruh eksternal, antara lain, keberadaan kekuatan raksasa ekonomi Jepang dengan kemampuan teknologi dan budaya agresif dan berkembangnya kekuatan ekonomi baru dari lima Macan Asia yang merupakan pesaing berat bagi Indonesia. Sedangkan pengaruh internal, antara lain tingkat kecapatan dan pendidikan sumber daya manusia pada umumnya berada di bawah rata-rata, budaya ekonomi yang statis, penyebaran penduduk yang tidak merata, sumber kekayaan alam yang belum mampu diolah karena keterbatasan teknologi dan modal.

Masyarakat Indonesia yang heterogen dan plural menyimpan potensi besar untuk masuk dalam konflik baik horisontal maupun vertikal, bahkan dapat berbentuk *complicated conflict* dan *latent*. Kemajemukan masyarakat secara kultural yang sangat rentan terhadap ketegangan konflik, dalam kondisi yang kritis dapat mengarah pada separatisme dan perang saudara. Dalam konteks ini yang dimaksud konflik adalah pertentangan atau pertikaian

sebagai sebuah masalah (*problem*) yang memerlukan alternatif tertentu untuk menyelesaikannya.

Suatu masalah tidak bisa langsung dibicarakan dalam waktu yang amat singkat, sehingga penyelesaian masalah tersebut harus dimulai dengan menata serta mengatur konflik tersebut agar dapat berjalan secara terkendali. Dengan kata lain, konflik merupakan suatu gejala yang selalu hadir dalam masyarakat dan senantiasa melekat dalam masyarakat tersebut, sehingga ia hanya akan dapat lenyap bersama lenyapnya manusia itu sendiri.

Karena itu yang dilakukan dalam mengendalikan konflik sebaiknya tetap berada pada dimensi tanpa kekerasan dibanding penyelesaian dengan kekerasan (*violence*). Kekerasan sering pula digunakan oleh pihak yang relatif inferior untuk memaksa pihak yang superior tunduk pada tujuan politik pihak inferior. Sarana pemaksa kekerasan itu lebih lazim dikenal sebagai teror (terorisme), yang cakupannya dapat bersifat nasional atau lintas nasional. Wujud kekerasan biasanya direpresentasikan dalam bentuk ketakutan yang melampaui batas kewajaran, sedangkan sasarannya adalah kegentaran moral pihak yang lebih superior.

Terorisme terjadi semakin rumit manakala sasarannya adalah masyarakat umum, yang tidak terlibat konflik, sarana, metode, dan ruang waktunya kadang-kadang tidak tertuga, seperti kasus Bom Bali I (2002) dan Bom Bali II (2005). Di wilayah negara kepulauan seperti Indonesia, peluang terjadinya kasus-kasus teror merupakan hal yang sangat besar dan sangat mungkin. Artinya, teror dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja, yang penting sasaran politik dapat dicapai. Selain itu terdapat pula masalah penting yang mempengaruhi secara positif maupun negatif terhadap integrasi nasional, yaitu nasionalisme dan ketimpangan sosial. Kedua masalah itu harus di transformasikan menjadi nilai-nilai bangsa yang dapat merupakan perekat bagi masyarakat bangsa yang pluralistik dan heterogen atau nasionalisme Indonesia.

Nasionalisme Indonesia sebagai identitas bukanlah kata benda yang bentuk dan wujudnya sudah jadi dan final, melainkan merupakan kata kerja yang berarti suatu proyek yang mesti terus-menerus dikerjakan, dibangun serta diberi dasar dan makna baru pada setiap kesempatan. Proses kerjanya dijalani lewat public critical rational discourse yang melibatkan seluruh bagian anak negeri sebagai yang sederajat tanpa pengecualian siapa pun.

Di tengah pusaran arus globalisasi, nasionalisme Indonesia bukan lagi memanggul senjata atau bambu runcing dengan semangat merdeka atau mati. Nasionalisme Indonesia bukanlah

patriotisme gaya Hitler atau Mussolini, juga melampaui semboyan termashur dari Perdana Menteri Britania Raya, Disraeli “benar atau salah, negeriku selalu benar”. Nasionalisme demikian oleh Mangunwijaya (2009) dimaknai sebagai nasionalisme pasca-Indonesia.

Arah nasionalisme pasca-Indonesia akan berkembang dengan mengambil sumber dari semangat dasar nasionalisme generalisasi 1928, yaitu suatu nasionalisme yang berpedoman *right or wrong* bukan *right or wrong is my country*. Hakekat nasionalisme generasi 1928 merupakan perjuangan dan pembelaan kawan manusia yang terbelenggu penjajahan, tertindas, miskin kemerdekaan dan hak menentukan diri sendiri.

Nasionalisme pasca-Indonesia seperti juga nasionalisme 1928, diarahkan untuk memperjuangkan hidup manusia yang termarginalisasi, teralienasi serta tidak berdaya menghadapi penguasa ekonomi, politik, budaya yang lalim dan sewenang-wenang. Bedanya, nasionalisme generasi 1928 ditujukan ke arah melawan asing dari luar, sedangkan bagi pasca-Indonesia yang hidup dalam pusaran globalisasi, batas-batas geopolitik semakin kabur.

Setiap bangsa dalam rangka mempertahankan kehidupan dan eksistensinya, serta untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, yaitu geostrategi nasionalnya, perlu memiliki pemahaman ilmu geopolitik yang dalam implementasinya memerlukan suatu strategi yang bersifat nasional, yaitu geostrategi. *Mapping global strategy* ke depan sangat diperlukan bagi setiap bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara yang merupakan konsep nasional dari ilmu geopolitik mengenai persatuan dan kesatuan dalam berbagai bidang kehidupan, menjadi perekat bagi bangsa Indonesia.

Ketahanan nasional di sini merupakan konsepsi ketahanan dari ilmu geostrategi yang mewujudkan keuletan dan ketangguhan suatu bangsa. Sedangkan ilmu geopolitik adalah pengetahuan yang mempelajari tentang potensi kehidupan, politik, strategi, dan geografi yang dimiliki oleh suatu bangsa atas dasar jati dirinya. Selanjutnya, Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang satu kesatuan ideologi, satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, dan dalam satu kesatuan ketahanan nasional.

Dengan mudahnya nasionalisme, yang terutama disebabkan oleh begitu tingginya ketidakadilan, korupsi yang merajalela dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak diselesaikan secara tuntas lewat jalur hukum dan lainnya, maka musuh bangsa yang paling utama sekarang bukanlah penjajah, bukan pula tindakan ekspansif maupun agresor negara tetangga, melainkan birokrasi yang korup, ketidakadilan dan/ atau ketidakmerataan ekonomi dan politik, kemiskinan, kekuasaan yang sewenang-wenang, dan lain sebagainya.

Pemberantasan korupsi yang hanya retorika belaka, pelanggaran HAM yang tidak diselesaikan lewat jalur hukum hingga tuntas, ketidakadilan antara pusat dan daerah dan sebagainya, harus segera diperhatikan secara serius. Nasionalisme dengan munculnya gerakan perjuangan fisik melawan Malaysia misalnya, bila Malaysia nekat mengganggu kedaulatan RI dengan mengambil atau merampas Pulau Ambalat, merupakan sebuah perilaku atau sikap yang sangat terpuji. Kita semua jelas sangat mendukung setiap usaha Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan para sukarelawan yang berupaya menjaga keutuhan kedaulatan negara RI.

Tetapi, kita tidak boleh lengah sedikit pun untuk memerangi musuh bangsa kita sendiri yang korup, menyalahgunakan kekuasaan dan lain sebagainya. Karena nasionalisme kita sekarang bukan berkaitan dengan penjajah atau terhadap perilaku ekspansif atau agresor negara tetangga, melainkan harus dikaitkan dengan keinginan untuk memerangi semua bentuk penyelewengan, ketidakadilan, perlakuan yang melanggar HAM dan lain sebagainya. Artinya, nasionalisme saat ini adalah upaya untuk mempertahankan eksistensi bangsa dan negara dari kehancuran akibat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Perilaku korup, menggelapkan uang negara, memanfaatkan segala fasilitas dalam lingkup kekuasaannya demi memperkaya diri, perilaku sewenang-wenang dalam menjalankan roda kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain, gemar menerima dan menyogok uang pelicin, uang semir, uang kopi, dan lain sebagainya adalah perilaku anti-nasionalisme yang harus diberantas.

Pahlawan era sekarang bukan saja mereka yang berani menumpas agresor atau penjajah, tetapi juga mereka yang berani berkata tidak terhadap koruptor dan berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan/ atau kekuasaan itu. Pahlawan seperti ini tidak kalah mulianya dibanding pahlawan yang menang dari sebuah pertarungan fisik melawan siapa pun yang mencoba mengganggu kedaulatan bangsa dan negara

Di lain pihak kita sekarang makin sulit menemukan jiwa nasionalis. Kita malah menganggap remeh para pejuang yang telah berjasa bagi kita. Pemerintah, misalnya, terkesan kurang memperhatikan nasib para veteran. Kita seakan tenggelam dalam arus globalisasi dan kapitalisme yang mengubah mentalitas kita menjadi sangat jauh dari mental nasionalis. Banyak di antara kita yang rela menjual tanah airnya, hanya karena sedikit kemewahan dari negeri orang. Mereka justru membangga-banggakan negeri orang lain dibanding negerinya sendiri. Contohnya adalah penduduk Indonesia yang saat ini justru lebih senang menggunakan produk luar negeri daripada memakai produk buatan dalam negeri. Memang, bisa saja produk luar negeri secara kualitas lebih menjamin, karena bangsa Indonesia belum mampu bersaing untuk menciptakan suatu teknologi yang canggih untuk menciptakan produk berkualitas. Tetapi sikap masyarakat yang lebih mencintai produk luar negeri tersebut sangatlah tidak dibenarkan, dan mereka tidak memikirkan dampak negatifnya.

Dengan demikian perjuangan kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan dari nasionalisme pasca-Indonesia tidak hanya diarahkan ke pihak-pihak asing tetapi juga ke dalam negeri sendiri, bahkan tertuju pada individu masing-masing. Nasionalisme pasca-Indonesia merupakan perjuangan untuk meniadakan segala bentuk eksploitasi manusia (juga lingkungan hidup beserta semua penghuninya) yang dilakukan oleh siapa pun, di manapun datangnya serta dalam bentuk apa pun.

Nasionalisme pasca-Indonesia tidak menghabiskan hidupnya untuk memaksakan memilih salah satu, pro atau kontra globalisasi. Bagi nasionalisme pasca-Indonesia, globalisasi merupakan serangkaian proses sejarah yang tidak terelakkan (*unevitable*). Kita bangsa Indonesia tidak mungkin lari apalagi menolak serta menghentikan proses globalisasi. Nasionalisme pasca-Indonesia lebih *concern* dengan persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana mengawal globalisasi supaya semakin manusiawi dan lebih bersahabat.

Untuk itu semangat kebangsaan harus dikembangkan ke arah nasionalisme demokratis, konstruktif yang tidak mempertentangkan kepentingan nasional dengan kepentingan regional dan global, yang melihat negara dan bangsa ini bagian dari dunia dan yang memberikan motivasi yang hebat bagi bangsa untuk memperkecil jurang kemjuan di segala bidang dengan negara-negara yang telah lebih maju, ketimpangan sosial harus ditransformasikan menjadi keadilan sosial.

Sebagai suatu proses, integrasi nasional menekankan pada persatuan persepsi dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Di dalam masyarakat ditemukan integrasi

dalam dua dimensi, yaitu vertikal dan horisontal. Dalam dimensi vertikal, integrasi nasional bertujuan mengintegrasikan persepsi dan perilaku elite dan massa, yaitu dengan menghilangkan atau mengurangi kesenjangan-kesenjangan antarkelompok yang berpengaruh dan kelompok-kelompok yang dipengaruhinya.

Sementara dalam dimensi horisontal, integrasi nasional berkaitan dengan kadar integrasi antara kelompok-kelompok masyarakat. Pada dimensi ini proses integrasi dilakukan upaya untuk menjembatani perbedaan-perbedaan yang dilahirkan oleh faktor-faktor teritorial (termasuk kultural) dengan jalan mengurangi kesenjangan-kesenjangan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut. Secara vertikal, faktor-faktor yang dapat menghambat proses integrasi terselip di dalam perbedaan-perbedaan yang ada pada kelompok elite serta massa. Perbedaan-perbedaan ini dapat berupa latar belakang pendidikan, kehidupan ekonomi maupun politik.

Dari sudut horisontal, di antara faktor-faktor yang menghambat proses integrasi adalah nilai primordial yang sering begitu menonjol dalam masyarakat yang majemuk. Apa yang pada umumnya dimaksudkan sebagai nilai primordial atau primordialisme itu ialah ikatan kesetiaan yang mencakup faktor-faktor seperti daerah kelahiran, suku, ikatan darah, ras, dan agama serta bahasa.

Adanya berbagai kelompok dalam masyarakat yang memiliki faktor atau kombinasi faktor yang berbeda-beda dapat menimbulkan kesenjangan atau bahkan pertentangan dalam masyarakat. Pada struktur masyarakat dan struktur negara bangsa yang kompleks, derajat loyalitas rakyat terhadap bangsa dan negaranya dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Loyalitas vertikal, yaitu derajat kepatuhan dan kesetiaan yang ditunjukkan oleh:
 - a. Massa terhadap pemimpin non-formal, terhadap elite politik dan/ atau terhadap pemerintah.
 - b. Masyarakat terhadap hukum.
 - c. Pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.
2. Loyalitas horizontal, yaitu derajat kepatuhan dan kesetiaan yang ditunjukkan oleh:
 - a. Kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya.
 - b. Masyarakat terhadap kebudayaan (norma dan tata nilai) dan hukum.
 - c. Pemerintah daerah terhadap pemerintah daerah lainnya (lebih lazim disebut solidaritas antarkawasan).

Derajat loyalitas amat ditentukan oleh jaminan kepastian bahwa kepastian dan kepatuhan terhadap masyarakat, baik vertikal maupun horizontal, tetap berjalan secara harmonis. Harmonis mengandung makna bahwa kesetiaan dan kepatuhan diimbangi oleh perlindungan yang memadai, baik oleh pemimpin, elite politik, oleh hukum, maupun oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Ancaman disintegrasi bangsa diartikan sebagai pengingkaran terhadap integrasi bangsa yang kadarnya melampaui derajat toleransi yang diizinkan. Memahami ancaman disintegrasi bangsa harus bertolak dari akar penyebab pengingkaran integrasi itu sendiri. Pada konteks integrasi bangsa kita harus memahami pula perihal integrasi wilayah, integrasi massa elite, integrasi nilai, dan tata laku integratif yang akan menentukan kadar tata hubungan dan ragam konflik vertikal dan horizontal.

Integrasi bangsa berarti penyatuan unsur-unsur yang berbeda-beda yang terdiri dari berbagai suku-suku bangsa dengan cara memadukan perbedaan-perbedaan di antara suku-suku itu, bukan dengan menghilangkan perbedaan (karena perbedaan tidak dapat dihilangkan). Dalam integrasi bangsa, pemerintah memegang peranan yang cukup besar dalam membina dan menyatukan seluruh unsur bangsa, dan berbagai bahasa yang berbeda untuk mengintegrasikan mereka. Itulah sebabnya diperlukan peran pemerintah. Pemerintah memberikan pengertian dan pendidikan bahwa perbedaan harus bisa diterima oleh seluruh rakyat. Lewat pendidikan, setiap suku akan dapat mengerti dan menerima perbedaan bangsa.

Bangsa yang multi etnik pada dasarnya akan selalu menghadapi resiko pecahnya gejala etnik. Menghadapi potensi gejala rakyat seperti itu perlu diimbangi oleh geopolitik yang bertumpu kepada karakteristik geografi sebagai ruang hidup bangsa Indonesia. Kondisi geografis yang merupakan negara kepulauan memerlukan wawasan nasional yang sesuai, yaitu Wawasan Nusantara.

Dalam konteks pemanfaatan geografi politik sebagai instrumen kebijakan nasional, maka geopolitik Indonesia telah sesuai dengan kondisi alamiahnya. Kondisi ini semakin diperkuat dengan pengakuan dunia internasional yang diwujudkan dalam bentuk pengakuan prinsip negara kepulauan (*archipelagic state principles*), dituangkan ke dalam konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional tahun 1982 (UNCLOS 1982).

Geopolitik Indonesia yang bertumpu pada prinsip negara kepulauan secara alamiah dan berdasarkan pengalaman sejarah menurut bangsa Indonesia untuk senantiasa menerapkan

upaya nasional yang mengandalkan pada kekuatan gabungan. Kekuatan gabungan itu merupakan imperatif yang sesuai dengan karakteristik negara kepulauan yang rawan dari berbagai arah. Kekuatan gabungan, dengan perkataan lain, wawasan gabungan, adalah inti dari kekuatan geopolitik Indonesia.

Tuntutan agar diterapkannya prinsip kekuatan gabungan ini juga merupakan logika penjabaran dari paradigma nasional di atas, yaitu Pancasila yang mengamanatkan keselarasan, kererasian dan keseimbangan, Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan keseimbangan antarwilayah, antarpusat dan daerah dan antarsektor-sektor/fungsi-fungsi pemerintahan negara.

Pada tataran masyarakat bangsa Indonesia, kehendak bersatu pada awal pembentukannya dipengaruhi oleh rasa memiliki terhadap ruang hidupnya (*territorial awareness*), ketertarikan dengan ruang hidup yang menyebabkan masyarakat menjadi statis dan senantiasa curiga kepada para pendatang. Pada tataran yang lebih ekstrim *territorial awareness* melahirkan *territorial attitude and behavior* yang kemudian mengkristal menjadi geopolitik (contoh konkret, penduduk Bali senantiasa beranggapan memiliki Pulau Bali).

Peluang yang tersedia dan layak dimanfaatkan untuk mencehah disintegrasi bangsa, antara lain:

1. Reformasi nasional yang secara nyata mendorong bangsa Indonesia untuk membangun masa depannya ke arah yang lebih baik atas dasar prakarsa masyarakat, prakarsa daerah, lebih kuat dibanding prakarsa pemerintah dan prakarsa pusat.
2. Semangat persatuan dan kesatuan, kendati sering dihadapkan dengan bahaya perpecahan, kenyataannya masih tetap dipercaya sebagai semangat kejiwaan seluruh bangsa Indonesia (nasionalisme Indonesia). Diktatornya, antara lain, fenomena aspirasi separatisme yang berkembang di Aceh, Maluku, dan Irian Jaya (Papua) hanya merupakan sempalan yang menunjukkan bahwa daerah menginginkan perhatian lebih dari era sebelumnya.
3. Paradigma nasional mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, masih dipercayakan sebagai paradigma yang mampu mencegah disintegrasi. Masalahnya adalah pencitraan paradigma tersebut harus dikemukakan dalam bahasa yang lebih komunikatif.

Kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mencegah disintegrasi, antara lain:

1. Masalah sistemik yang bersifat institusional, yaitu warisan kondisi dari Orde Baru, yaitu semua fungsi pemerintahan dipikul oleh lembaga-lembaga pusat dan terpusat.
2. Masalah struktural, antara lain sistem perekonomian Indonesia yang selama 33 tahun terakhir sangat bersifat sentralistik/ekonomi komando, pembiayaan pembangunan nasional yang seharusnya dibiayai dari pinjaman luar negeri yang menyisakan beban hutang sangat berat.
3. Masalah kebudayaan yang selama 33 tahun terakhir, budaya Indonesia seolah-olah ditinggalkan, menghasilkan mentalitas yang memandang perbedaan sebagai suatu pertentangan.
4. Masalah paradigma, yang berubah secara signifikan, dari semula masyarakat yang otoritarian menjadi masyarakat yang tertata (*civil society*).

Masyarakat modern pada umumnya mampu memecahkan masalah yang tumbuh dalam tubuhnya melalui cara-cara penyelesaian konflik konvensional, artinya penyelesaian konflik lebih mengutamakan dialog dan cara-cara damai. Sebaliknya, pada masyarakat yang tingkat pendidikannya relatif rendah, biasanya temperamental. Oleh karena itu cara-cara kekerasan lebih menonjol dibanding cara-cara damai.

Integrasi adalah bentuk kontradiktif dari konflik. Dalam kehidupan nyata, integrasi bisa hadir bersamaan dengan konflik. Bahkan pada kondisi tertentu, adanya konflik justru memperkuat cara-cara penyelesaian melalui dialog yang mampu menciptakan keseimbangan baru. Konsepsi tersebut mengisyaratkan bahwa integrasi semakin kuat apabila didukung oleh proses interaksi dan komunikasi intensif antarkelompok kepentingan masyarakat. Dari situ terwujudlah *society networking*, yang merupakan prasyarat bagi tumbuhnya kesatuan persatuan sebagaimana dituntut oleh Wawasan Nusantara.

Society networking ini kendati tumbuh dan berkembang pada masyarakat yang independen, pada kenyataannya tetap memerlukan kehadiran sosok pemimpin yang diakui bersama. Namun demikian, kehadiran pemimpin tersebut harus cocok dengan kondisi perkembangan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemimpin yang dituntut adalah pemimpin yang populis, yang dekat dengan rakyatnya, yang mengerti dan peka terhadap aspirasi yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Dalam konteks pemanfaatan faktor-faktor geografi guna menunjang terjaminnya integrasi, dengan perkataan lain mencegah potensi disintegrasi, maka antara pemimpin dan masyarakatnya harus terjalin suatu hubungan timbal balik dan mampu membangun kohesivitas bersama. Indikasi integrasi wilayah berkaitan dengan masalah *state building* (membangun negara) sebagai hal yang berbeda dengan *nation building*. Umumnya negara timbul mendahului bangsa. Pembangunan bangsa (*national building*) mengandaikan adanya negara terlebih dahulu yang berkuasa dalam wilayah tertentu dan masanya yang sudah diakui dunia internasional.

Negara menunjukkan pada adanya kekuasaan pusat dengan kapasitas untuk menguasai wilayah tertentu. Bangsa menunjukkan pada kesetiaan subjektif penduduk di wilayah tersebut kepada negara. Integrasi wilayah memerlukan adanya dukungan kaum elite dan massa, di antara yang memerintah dan diperintah, dan terjadi bukan bila telah terwujud suatu pola wewenang pemerintah dan pola permufakatan rakyat. Konsep negara bangsa menunjukkan bahwa derajat loyalitas rakyat baik vertikal maupun horizontal menentukan integrasi nasional. Identik dengan konsep loyalitas, menurut Hebert Simon, terbentuk atau lahir dari keselarasan antara premis individu (rakyat) dan tujuan organisasi (pemerintah).

Premis individu terdiri dari fakta berupa kesejahteraan, kondisi ekonomi masyarakat, sedangkan *value* (nilai) berupa penghargaan, pengakuan serta perlakuan yang setara. Jika tujuan dan pemerintah ternyata tidak mampu ditunjukkan dalam wujud kesejahteraan, perlakuan dan penghargaan yang seimbang, maka yang terjadi bukanlah suatu loyalitas sosial, melainkan justru perlawanan (*social disobedience*). Adanya perkembangan perilaku negatif masyarakat ini menjadi lebih mudah untuk dipengaruhi oleh lingkungan luar pranata sosialnya, berupa gaya-gaya tertentu.

Gaya yang bekerja dan berpengaruh untuk merusak integrasi nasional baik dari dalam maupun dari luar pranata sosial, disebut Gaya Sentrifugal. Gaya yang bekerja dan berpengaruh untuk memperkuat integrasi nasional, baik dari dalam maupun dari luar, disebut Gaya Sentripetal. Kedua gaya di atas bekerja secara simultan, apabila gaya sentrifugal dapat mengalahkan gaya sentripetal, pranata sosial cenderung mengarah pada disintegrasi. Sebaliknya bila gaya sentripetal dapat mengurangi gaya sentrifugal, pranata sosial akan semakin kuat integrasinya. Faktor yang menentukan besaran kedua gaya adalah loyalitas, konflik kepentingan, dan kemampuan untuk mengendalikan konflik (konflik manajemen).

Pada masyarakat yang sederhana dan tradisional, kemampuan dalam mengendalikan konflik pada umumnya bersifat top down, artinya peran pemimpin dan penggunaan kekuasaan dominan. Sebaliknya pada masyarakat yang modern, kemampuan untuk mengendalikan konflik bersifat *bottom-up*, artinya masyarakat dan budaya masyarakat itu sendirilah yang dominan.

Dalam konteks geopolitik, pemanfaatan faktor-faktor biografi seperti luas wilayah, bentuk bumi, posisi dan kondisi alamiah geografi negara, kondisi perbatasan, kesemuannya dalam segala konfigurasinya, guna mencegah potensi disintegrasi minimal memerlukan adanya pemeliharaan secara seimbang antara gaya sentripetal dan gaya sentrifugal di atas melalui integrasi elite massa dan integrasi wilayah (pusat daerah, antar daerah).

Kesimpulan

1. Masyarakat Indonesia yang heterogen dan pluralistik menyimpan potensi besar untuk masuk dalam konflik, baik horizontal maupun vertikal, bahkan dapat berbentuk *complicated conflict* dan laten. Kemajemukan masyarakat secara kultural yang sangat rentan terhadap ketegangan konflik, dalam kondisi yang kritis dapat mengarah pada separatisme dan perang saudara
2. Sebagai suatu proses, integrasi nasional menekankan pada persatuan persepsi dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Di dalam masyarakat ditemukan integrasi dalam dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Dalam dimensi vertikal, integrasi nasional bertujuan mengintegrasikan persepsi dan perilaku elite dan massa, yaitu dengan menghilangkan atau mengurangi kesenjangan-kesenjangan antarkelompok yang berpengaruh dan kelompok-kelompok yang dipengaruhi.
3. Sementara dalam dimensi horizontal, integrasi nasional berkaitan dengan kadar integrasi antara kelompok-kelompok masyarakat. Pada dimensi ini, proses integrasi dilakukan upaya untuk menjembatani perbedaan-perbedaan yang dilahirkan oleh faktor-faktor teritorial (termasuk kultural) dengan jalan mengurangi kesenjangan-kesenjangan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut.
4. Perilaku korup, menggelapkan uang negara, memanfaatkan segala fasilitas dalam lingkup kekuasaan demi memperkaya diri, perilaku sewenang-wenang dalam menjalankan roda kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain,

gemar menerima dan memberi uang pelicin, uang semir, uang kopi dan lain sebagainya adalah perilaku anti-nasionalisme yang harus diberantas.

Kepustakaan

Dimock & Dimock. 1986. *Public Administration*.

Dunn, Willian N. 1981. *Public Policy Analysis*.

Fred, David. R. 2002. *Manajemen Strategis. Konsep Edisi Bahasa Indonesia*. Pearson Education Asia Pte. Jakarta: PT Prehallindo.

Hardiman, Budi dan White LoueS. 1987. *Manajemen Pembangunan Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.

Lanur, Alex. 1996. *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka, Problem dan Tantangannya*. Yogyakarta: Kanisius.

Lembaga Informasi Nasional RI. 2002. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (sesudah Amandemen).

Lemhannas. 2000. *Wawasan Nusantara*.

-----, 2000. *Ketahanan Nasional Indonesia*.

Notonagoro. 1975. *Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Penerbit Pancuran Tujuh.

Ohmae, Kenichi. 2005. *The Next Global Stage*. New York: Whaston School.

Setiardja, Gunawan. 1995. *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Suryadinata, Ermaya. 2004. *Manajemen Keanekaragaman Dalam Kehidupan Berbangsa, Lingkungan, Otonomi Daerah, Geopolitik Intelijen*. Jakarta: Lamhannas.

Suryosumarto, Budisantoso H. 2001. *Ketahanan Nasional Indonesia; Penangkal Disintegrasi Bangsa dan Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.